Pendidikan: Arena Perebutan Wacana dalam Media¹

AG. Eka Wenats Wuryanta, M.Si²

Pendahuluan

Kajian ilmu komunikasi menjadi sangat menarik ketika komunikasi pada tingkat praksisnya menyentuh aspek kemanusiaan. Tentu saja, aspek kemanusiaan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, psikologi dan kebudayaan manusia itu sendiri (Littlejohn, 2007). Dalam proses perkembangan kebudayaan manusia, komunikasi massa menjadi proses komunikasi yang mempunyai tingkat pengaruh yang cukup signifikan pada kehidupan sehari-hari.

Berita, dalam konteks komunikasi massa yang berkembang sampai sekarang, selalu muncul dalam benak dan pikiran manusia. Berita yang disusun dalam benak manusia bukan merupakan peristiwa manusia. Berita bukan adalah peristiwa itu sendiri. Berita merupakan usaha rekonstruksi kerangka peristiwa yang terjadi. Maka, berita dalam konteks komunikasi massa, lebih merupakan inti yang disesuaikan dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki makna bagi para pembacanya (Wilbur Schramm, 1949). Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruk sosial. Berita, pada titik tertentu, sangat mempengaruhi manusia merumuskan pandangannya tentang dunia (*Weltanschauung*). Pandangan terhadap dunia adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia dimaknai dalam bingkai tersebut. Tanpa adanya bingkai yang jelas, kejadian, peristiwa dan pengalaman manusia akan terlihat “kacau” dan *chaos*. Bingkai pengalaman dapat dilihat sebagai “skenario awal” yang memposisikan setiap pengalaman dan peristiwa dalam plot cerita yang kurang lebih runtut, rasional dan sistematis.

Sementara itu, banyak berita yang telah merekam bahwa krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berdampak pada mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan juga pada mutu pendidikan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari indikator secara makro, yakni pencapaian Human Development Index (HDI) dan indikator secara mikro, seperti misalnya kemampuan dalam hal membaca dan menulis. Pada tahun 2005, HDI Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan peringkat tersebut semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. HDI Indonesia tahun 1997 adalah 99, lalu tahun 2002 menjadi 102, kemudian tahun 2004 merosot kembali menjadi 111 (Human Development Report 2005, UNDP). Indonesia berada di posisi empat negara yang tercepat memperbaiki human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM) dalam 40 tahun terakhir (1970-2010). Meski demikian, peringkat IPM Indonesia 2010

¹ Drafting Idea, dilarang mengutip; dipresentasikan dalam Temu Nasional II Pers Mahasiswa yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta, 11 Januari 2011

² Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta.

masih di posisi 108 dari 169 negara. Dengan posisi 108, Indonesia masih kalah dengan Namibia yang berada di 105, Filipina 97, Thailand 92, Sri Lanka 91, Tiongkok 89, Malaysia 57, dan Singapura 27.

Menurut Laporan Bank Dunia (Greaney, 1992) dan studi IEA (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*), di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD di Indonesia berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia). Kondisi anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai 30 persen dari materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini disebabkan karena mereka sangat terbiasa dalam menghafal serta mengerjakan soal pilihan ganda. Sementara itu, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia (berdasarkan survei *Political and Economic Risk Consultant*). Dalam hal daya saing, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara di dunia (The World Economic Forum Swedia, 2000). Ini artinya: Indonesia hanya berpredikat sebagai **follower**, bukan sebagai **leader**. Sementara itu di waktu yang lain dinyatakan bahwa peringkat daya saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) 2010 telah mengalami kenaikan substansial, yakni menempati peringkat ke-44 di tahun 2010 ini dari peringkat ke-54 pada tahun 2009. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia terutama disebabkan oleh meningkatnya peringkat pada indikator makroekonomi (dari peringkat 52 menjadi 34), kesehatan dan pendidikan dasar (dari 82 menjadi 62), *quality of overall infrastructure* (dari 96 menjadi 90), *intellectual property protection* (dari 67 menjadi 58), *national savings rate* (dari 40 menjadi 16), *effectiveness of anti-monopoly policy* (dari 35 menjadi 30), dan *extent and effect of taxation* (dari 22 menjadi 17).

Rangkaian premis di atas memperlihatkan bahwa sektor pendidikan bukan menjadi sektor yang mempunyai tingkat perhatian mendasar seperti isu hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Tingkat perhatian yang belum maksimal ini yang pada akhirnya isu tentang pendidikan belum menjadi isu publik yang massif meskipun secara substansial pendidikan mempunyai nilai sosial yang strategis. Belum jadinya isu publik yang massif mengakibatkan “media” enggan untuk mengekspos secara massif.

Sejauh mana media massa mempunyai peran dalam masyarakat? Bagaimana konstelasi media massa kontemporer dalam pertarungan wacana tentang pendidikan? Bagaimana memahami agenda setting media dalam lingkup wacana pendidikan.

Peran Media Massa dalam Pembangunan

Membicarakan peran media dalam era pembangunan dapat dilakukan secara bertimbal-balik. Pertama, apa yang dapat diperankan oleh media massa dalam era pembangunan sekarang; dan kedua, bagaimana pembangunan media atau pers nasional selama ini. Dalam GBHN, dalam bagian "Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri", disebutkan: Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang berdasarkan Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas

dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa peranan pers merupakan satu sisi mata koin dengan sisi lainnya berupa pembangunan media massa berdasarkan Pancasila.

Adapun media dalam hal ini pers berdasarkan Pancasila itu disebutkan pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Dengan dasar keberadaan semacam itu, pers dapat menjalankan peranannya dalam pembangunan. Peranan pers dapat dipahami melalui fungsinya yaitu:

1. Penyebar informasi yang obyektif dan edukatif
2. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif
3. Menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Ketiga macam fungsi pers menurut versi GBHN ini pada dasarnya berlangsung melalui isi pers. Dari kerangka berpikir ini agaknya dapat dipahami titik tolak dalam melihat kemajuan pers adalah dari kapasitas personelnya. Disebutkan dalam GBHN: agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan media massa dapat makin efektif, perlu ditingkatkan jumlah dan mutu tenaga terdidik sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi komunikasi. Jika titik-berat perhatian dalam memandang peranan pers adalah pada isinya, sudah barang tentu faktor sumberdaya manusia pengelola media pers menjadi faktor penting. Ini ditempuh dengan peningkatan kapasitas personel media pers agar sesuai dengan jalannya pembangunan. Kapasitas yang harus dimiliki oleh personel pers jika dikaitkan dengan fungsi medianya adalah dapat memilih informasi yang obyektif dan edukatif. Dua istilah ini kedengarannya sederhana, namun praktisi pers dapat berbicara banyak betapa rumit dan riskan kriterianya. Begitu pula dalam menjalankan kontrol sosial, personel pers harus pandai-pandai memilih obyek yang dapat dijadikan informasi yang bersifat kontrol sosial. Sedang dalam menyalurkan aspirasi rakyat, agaknya personel pers harus dapat memilih aspirasi macam apa dan rakyat mana yang dapat disalurkan aspirasinya. Terlepas dari kesulitan untuk mengoperasionalkan sejumlah fungsi tadi, dapat ditangkap bahwa titik berat perhatian terhadap pers pada dasarnya bersifat mikro.

Penilaian dilakukan terhadap isi media pers. Pandangan semacam ini merupakan salah satu cara dalam menilai media pers. Cara yang lain dapat dilakukan dengan melihat secara makro, yaitu terhadap media pers dalam struktur komunikasi sebagai bagian struktur sosial. Cara pertama, dengan pendekatan mikro menempatkan media pers sebagai institusi yang menjalankan fungsi sosialnya melalui isi jurnalistiknya. Sedang cara kedua tidak hanya melihat dari isi satu persatu media pers, tetapi dari interaksi media pers dalam struktur sosial. Dengan melihat keberadaannya dalam struktur sosial, dapat dijawab apakah media pers berada dalam struktur komunikasi yang tidak seimbang, dan lebih jauh dapat dilihat sebagai indikator bagi struktur sosial. Dengan kata lain, dengan menjadikan struktur komunikasi sebagai indikator, dapat dijawab apakah struktur sosial bersifat tidak seimbang pula. Upaya melihat keseimbangan atau ketidakseimbangan struktur sosial ini kiranya akan bermanfaat dalam menjawab tantangan

pembangunan. Jika pembangunan dapat juga dipandang sebagai upaya untuk mengurangi secara bersengaja ketidakseimbangan dalam struktur sosial, maka kajian yang bersifat makro ini perlu pula dilakukan.

Perspektif Ekonomi Politik Dan Wacana Media

Menurut Mosco (1996), pengertian ekonomi politik bisa dibedakan dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnya

relasi kekuasaan yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya termasuk sumber daya komunikasi. Dalam pengertian luas kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Dewasa ini ini setidaknya terdapat tiga konsep penting yang ditawarkan Mosco untuk mengaplikasikan pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi : komodifikasi (*commodification*); spasialisasi (*spatialization*); dan strukturasi (*structuration*).

Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan (Mosco, 1996). Nilai tambah produksi berita akan sangat ditentukan oleh kemampuan berita tersebut memenuhi kebutuhan sosial dan individual.

Spasialisasi berkaitan dengan proses penataan atau pengalokasian tempat di kota sebagai transformasi data dan ruang proses penataan atau pengalokasian tempat di kota. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media (Mosco, 1996). Ukuran badan usaha media dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam produksi media.

Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial dan praktek sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1996).

Secara makro, Peter Golding dan Graham Murdock (dalam Curran dan Gurevitch, 1991:15 – 32) menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik komunikasi massa bisa dibedakan menjadi dua macam paradigma yaitu perspektif ekonomi politik dalam paradigma liberal; dan perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis.

Perspektif ekonomi politik liberal berpusat pada isu proses pertukaran pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Semakin besar kekuatan pasar memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya.

Mekanisme pasar itu, diatur oleh apa yang disebut Adam Smith sebagai “tangan tersembunyi” (*the invisible hand theory*). Media massa menurut pandangan liberal ini benar-benar dilihat sebagai sebuah produk kebudayaan yang harus diberikan

kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapapun juga dan untuk berkompetisi secara bebas dalam pasar tersebut.

Varian ekonomi politik liberal merupakan aliran pemikiran yang memberikan penekanan pada peran media massa di dalam mempromosikan kebebasan untuk berbicara (*freedom of speech*). Pemikiran ini memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah masyarakat dipahami sebagai kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini berarti kelompok yang berkuasa atau kelompok yang dominan tidak terdapat. Kriteria kedua adalah media dilihat sebagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapatkan otonomi dari negara, partai-partai politik serta kelompok penekan. Kriteria ketiga adalah kontrol media dimiliki oleh elit manajerial yang otonom, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas terhadap profesional media. Kriteria keempat adalah hubungan antara institusi media dan khalayak bersifat simetris.

Dalam perspektif ekonomi politik kritis, perspektif ekonomi politik mengikuti Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya ataupun industri lainnya, bukannya pada proses pertukaran sebagaimana dilakukan liberalisme. Perspektif ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu dilihat dalam struktur yang lebih luas lagi.

Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada paradigma kritis. Golding dan Murdock berpendapat bahwa perspektif ekonomi politik kritis berbeda dengan arus utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holisme, keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik; dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan moralitas seperti masalah keadilan, kesamaan, dan kebaikan publik (*public goods*).

Sifat holistik dalam perspektif ini (terutama dalam konteks analisa ekonomi politik kritis) merupakan satu dari beberapa pertimbangan yang dibuat dalam konteks perspektif ekonomi politik kritis. Holistik di sini berarti menunjukkan adanya keterkaitan saling mempengaruhi antara organisasi ekonomi dan kehidupan politik, sosial, dan kultural. Analisisnya bersifat historis dan secara moral menunjukkan keterkaitannya dengan persoalan *public good*. Aspek historis dalam sifat holisme perspektif ekonomi politik kritis berpusat pada analisa pertumbuhan media, perluasan jaringan dan jangkauan perusahaan media, komodifikasi dan peran negara.

Analisa ekonomi politik kritis memperhatikan perluasan “dominasi” perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Tentu saja, ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar (dalam penelitian ini terlihat faktor militer yang menentukan makna dan isi pasar). Proses komodifikasi justru menunjukkan menyempitnya ruang kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan menyaring informasi.

Dalam konstataasi di atas, maka tidak mengherankan apabila peran media di sini justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas objektif yang sudah bias karena dibutnuk oleh kelompok kepentingan baik secara politik maupun ekonomis. Perjuangan kelas biasanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran media adalah menutupi dan merepresentasi secara bias dan manipulatif antagonisme tersebut. Ideologi dimanfaatkan untuk menghapus dan mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kelas dibuktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan kepentingan kelas yang dominan.

Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisa secara penuh pada campur tangan publik sebagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada.

Sedangkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh analisa ekonomi politik kritis terdiri dari tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya kelas-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

Perspektif ekonomi-politik kritis memiliki tiga varian utama. Ketiga varian tersebut adalah instrumentalisme, kulturalisme, dan strukturalisme. Dalam penelitian ini, varian yang digunakan adalah perspektif instrumentalisme. Perspektif ini memberikan penekanan pada determinisme ekonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini melihat media sebagai instrumen dari kelas yang mendominasi. Dalam hal ini kapitalis dilihat sebagai pihak yang menggunakan kekuatan ekonominya - untuk kepentingan apapun - dalam sistem pasar komersial untuk memastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya.

Apabila *mainstream* ilmu ekonomi melihat persoalan ekonomi sebagai satu hal dominan yang terpisah dan khusus, maka perspektif ekonomi politik kritis melihat persoalan ekonomi itu berada dalam hubungan dengan kehidupan politik, sosial, dan budaya. Liberalisme menekankan pada kedaulatan dan kebebasan individual dalam kapitalisme, maka paradigma kritis memberikan penekanan pada relasi sosial (*social relations*) dan kekuasaan (*power*).

Ekonomi-Politik Produksi Teks

Produksi makna dalam sebuah teks merupakan konsekuensi kekuasaan yang berdampak pada lingkup konsumsi budaya. Golding dan Murdock menyatakan bahwa ekonomi merupakan faktor penentu penting untuk praktek produksi teks media. Alasannya adalah bahwa ekonomi merupakan organisasi pembuat keuntungan dan institusi industri budaya yang sangat terbuka pada tekanan proses komodifikasi dan strukturasi, dan institusi yang punya pola kepemilikan yang khas.

Luas dan besarnya kepemilikan media di tangan konglomerat atau pemegang kekuasaan secara tidak langsung telah membuat media menjadi lebih terintegrasi pada kepentingan pemilik serta memperdalam ikatan mereka dengan kepentingan kelas kapitalis.

Dalam perspektif ekonomi politik produksi tetap dibuka kemungkinan faktor instrumentalisme dan strukturalisme dalam analisa penelitian. Instrumentalisme berpusat pada cara dan sarana kaum kapitalisme atau pemilik modal menggunakan kekuasaan ekonomi dengan sistem pasar komersial untuk menjamin arus informasi publik yang harmonis dengan kepentingan mereka. Akibatnya, kontradiksi di dalam sistem tersebut bisa dilupakan.

Posisi kaum instrumentalis menyatakan bahwa kepemilikan media secara privat merupakan instrumen dominasi kelas (Currant & Guravitch, ed., 1991). Media berfungsi menggerakkan dukungan untuk kepentingan kelas yang berkuasa (Chomsky, 1988). Dengan demikian, terdapat lima saringan yang dilalui oleh pesan media. Pesan media melayani kekuasaan yang mapan, diproduksi oleh suatu industri atau institusi yang terkonsentrasi pada sejumlah besar korporasi, tergantung pada sumber ekonomi utama, tergantung pada pejabat pemerintah sebagai sumber, selalu ditekan oleh kelompok penekan dan diwarnai oleh ideologi tertentu (Herman & Chomsky, 1988; Downing, Mohammadi, 1990). Ketika sebuah media massa menawarkan pandangan yang kontra dan mempublikasikan skandal maka sebetulnya mereka menginginkan legitimasi mereka atau melegitimasi sistem kapitalisme secara keseluruhan dan melegitimasi sistem yang dianggap lawan.

Dengan menggunakan kekuasaan ekonomi dan sistem sosial yang mau ditawarkan, kelas dominan akan menangani lingkup wacana dan representasi. Penanganan lingkup wacana dan representasi ini bisa terwujud dalam bentuk perbaikan premis wacana, keputusan mana yang boleh dilihat dan dianggap penting oleh masyarakat umum dan menangani opini publik melalui propaganda.

Sebetulnya dalam konteks ekonomi politik media massa, terdapat pola kepemilikan media. Model pertama adalah model pola resmi, di mana media dikontrol negara. Model kedua adalah pola komersial, di mana media merefleksikan ideologi para pemegang modal. Model ketiga adalah pola kepentingan di mana media merefleksikan kepentingan partai politik dan kelompok keagamaan. Model keempat adalah pola informal di mana isi media merefleksikan ide dan konsep kontributor media tersebut.

Wacana Tekstual I: Pendidikan sebagai Mitos dan Realitas

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam *Education and Development: A Conflict Meaning* (1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk

memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi arahan bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis *Human Investment*, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analisis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanistik melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, ijazah.

Paradigma pendidikan *Input-Proses-Output*, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan *raw-input* dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai *instrumental input*. Jika *raw-input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produk yang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat partial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Sudah barang tentu asumsi tersebut jauh dari realitas dan

salah. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan *innovation*, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar berhasil melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan diuji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai *engine of growth*, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah *single track* dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistik, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori (*text bookish*)).

Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul *Education versus Qualifications* menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (*Erratic*). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan yang diikuti oleh para penentu kebijakan kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun metodologis. Pertama, tidak dapat diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu. Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal akan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki sistem teknologi produksi yang semakin kompleks. Tetapi, dalam kenyataannya, kemampuan teknologis yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Di samping itu, adanya perubahan di bidang teknologi yang cepat, justru melahirkan apa yang disebut dengan *de-skilled process*, yakni dunia industri memerlukan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Kedua, paradigma fungsional dan sosialisasi memiliki asumsi bahwa pendidikan sebagai penyebab dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat. Investasi di bidang pendidikan formal sistem persekolahan akan menentukan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tetapi realitas menunjukkan sebaliknya. Bukannya pendidikan muncul terlebih dahulu, kemudian akan muncul pembangunan ekonomi, melainkan bisa sebaliknya, tuntutan perluasan pendidikan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan ekonomi dan politik. Dengan kata lain, pendidikan sistem persekolahan bukanlah *engine of growth*, melainkan gerbong dalam pembangunan. Perkembangan pendidikan tergantung pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, karena hasil pembangunan ekonomi tidak bisa dibagi secara merata, maka konsekuensinya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tidak juga bisa sama di antara berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana terjadi dewasa ini.

Ketiga, paradigma fungsional dan sosialisasi juga memiliki asumsi bahwa pendapatan individu mencerminkan produktivitas yang bersangkutan. Secara makro upah tenaga kerja erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam realitas asumsi ini tidak pernah terbukti. Upah dan produktivitas tidak selalu sering. Implikasinya adalah bahwa kesimpulan kajian selama ini yang selalu menunjukkan bahwa *economic rate of return* dan pendidikan di negara kita adalah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lain, adalah tidak tepat, sehingga perlu dikaji kembali.

Keempat, paradigma sosialisasi hanya berhasil menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran mengembangkan kompetensi individual, tetapi gagal menjelaskan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Secara riil pendidikan formal berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individual yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi modern. Semakin lama waktu bersekolah semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Randal Collins, lewat karyanya *The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification* menentang tesis ini. Berbagai bukti tidak mendukung tesis atas tuntutan pendidikan untuk memegang suatu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerja dengan pendidikan formal yang lebih tinggi tidak harus diartikan memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang memiliki pendidikan lebih rendah. Banyak keterampilan dan keahlian yang justru dapat banyak diperoleh sambil menjalankan pekerjaan di dunia kerja formal. Dengan kata lain, tempat bekerja bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lebih canggih.

Wacana Tekstual II: Menakar Mutu Pendidikan Indonesia

Dunia pendidikan Indonesia menghadapi banyak problem. Yang paling akut adalah masalah mutu. Bagaimana mutu pendidikan Indonesia? Apakah pendidikan Indonesia bermutu tinggi, atau sebaliknya, bermutu rendah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita butuh standar. Kemudian standar tersebut kita letak untuk menimbang realitas. Standar itu adalah tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional —termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3— bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sudahkah *out put* pendidikan Indonesia mencerminkan sosok manusia seperti yang tergambar dalam tujuan pendidikan nasional di atas? Yang jelas, mari kita lihat bersama realitas yang ada. Di penghujung tahun 80-an, tawuran menjadi trend di kalangan pelajar. Seks bebas, *free sex*, menjadi hal yang biasa di kalangan terpelajar. Begitu juga halnya dengan narkoba. Berdasarkan hasil survei lewat angket yang disebar oleh pihak Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) bekerjasama dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, sebanyak delapan persen (8 %) dari seluruh penduduk berusia remaja/pemuda —siswa/mahasiswa— di Indonesia, tercatat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Aksi corat-corek setelah pengumuman hasil UAN —termasuk tahun ajaran 2005/2006, telah menjadi budaya pelajar.

Lebih miris lagi adalah tidak sedikit yang tamat sekolah, bahkan tamat kuliah, menjadi penganggur. Tahun 2001, tercatat lebih dari 800 ribu pengangguran tamatan perguruan tinggi. Mereka tidak bekerja ada yang memang tidak memiliki keterampilan hidup (*life skill*) dan ada pula yang lebih baik menganggur karena menunggu menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) daripada menciptakan lapangan kerja sendiri.

Kemudian, hasil studi *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini menyebutkan, angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. UNESCO menyebut angka 20 persen saja. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara miskin di belahan dunia lain. Dibandingkan Vietnam yang baru membangun sejak 1970-an pun, Indonesia kalah. Angka PAUD mereka jauh lebih tinggi, yakni 43 persen.

Ditambah lagi, laporan yang diterbitkan UNDP memposisikan indeks pembangunan manusia Indonesia pada 1997 menempati posisi 99. Lebih parah lagi, pada 2000 merosot ke peringkat 109. Hasil survei *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menyatakan dari 12 negara yang disurvei ternyata sistem pendidikan Indonesia berada pada peringkat 12, lebih rendah dari Vietnam, salah satu negara termuda di Asia Tenggara. Pak JK —saat menjadi Menko Kesra— mengatakan sistem pendidikan yang ada saat ini hanya mampu menciptakan manusia Indonesia "*kelas kuli*" atau pembantu rumah tangga. Dan itu berarti suatu kegagalan sebuah sistem menerjemahkan tuntutan perkembangan zaman yang menghendaki mutu pendidikan lebih baik.

Bahkan, ada masyarakat Indonesia yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan, atau bangku sekolah. Sehingga mereka buta huruf. Sensus penduduk tahun 1990 saja, misalnya, mencatat bahwa penduduk buta huruf usia 10 tahun ke atas ada 21.494. 117 orang, terdiri dari 6.928. 029 orang dan perempuan 14. 566.

088 orang. Sedangkan penduduk usia 10-44 tahun tercatat 8. 568. 430 orang, terdiri dari laki-laki 2. 833. 123 orang dan perempuan 5. 735. 307 orang.

Dari —sebagian— data dan fakta di atas, kita dapat mengambil dua kesimpulan: (1) mutu pendidikan Indonesia masih rendah dan tidak sesuai dengan kriteria manusia yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional; dan (2) standar terendah pendidikan di Indonesia masih berada pada tataran “buta huruf” —tidak mengenal huruf atau angka—, sedangkan di negara lain, standar terendah adalah “buta komputer”.

Wacana Tekstual III: Faktor Penyebab Mutu Pendidikan Indonesia Rendah

Apa yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia rendah? Sebelum kita mendiskusikan jawabannya, satu hal ingin saya kemukakan, bahwa untuk mencari “sebab” rendahnya mutu pendidikan Indonesia saat ini, tidak bisa kita temukan pada setahun atau dua tahun yang lalu, melainkan pada puluhan tahun yang silam. Mengapa? Karena dalam dunia pendidikan, apabila terjadi penyimpangan pada peserta didik, maka itu hasil dari sebuah proses yang panjang. Dengan kata lain, hasil dari proses pendidikan saat ini, baru akan terlihat pada puluhan tahun yang akan datang.

Hal itu dikuatkan oleh hasil riset seorang guru besar di Universitas Harvard yang melakukan penelitian pada sekitar 40 negara, berkaitan dengan periode kemajuan dan kemunduran yang dialami negara-negara itu sepanjang sejarahnya. Salah satu faktor utamanya adalah materi bacaan dan sajian —materi pendidikan— yang disuguhkan kepada generasi muda. Di 40 negara yang ditelitinya itu ditemukan bahwa 20 tahun menjelang kemajuan atau kemunduran tersebut, para generasi muda dibekali dengan bacaan yang yang mengantarkan mereka kepada kemajuan atau kemunduran.

Untuk menemukan faktor-faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan Indonesia, kita harus melacaknya dalam ruang waktu 20 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, beberapa faktor yang akan saya kemukakan, merupakan sebuah analisa sederhana terhadap dua dasawarsa yang lalu, tepatnya sejak tahun 1980 hingga saat ini.

Secara garis besar ada dua faktor yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia rendah, yaitu: pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Faktor internal —dalam dunia pendidikan disebut *instrumental input*— adalah faktor yang menjadi unsur-unsur pendidikan dan sangat menentukan proses pendidikan. Dan faktor eksternal atau environmental input adalah faktor dari lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pendidikan.

Yang termasuk faktor internal atau instrumental input, antara lain: pertama, Kualitas dan kuantitas guru rendah. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas tahun 2004. Guru SD Negeri yang tidak layak mengajar sesuai dengan bidang ilmunya sebanyak 558.675 orang atau 45,2% dan pada SD Swasta sebanyak 50.542 orang atau 4,1%, sehingga totalnya mencapai 609.217 orang atau sekitar 49,3% dari total guru 1.234.927 orang. Sementara di tingkat SMP, dari total guru sebanyak 466.748 orang, sebanyak 108.811 orang guru negeri dan 58.832 orang guru swasta yang

dinilai tidak layak mengajar. Untuk tingkat SMA, dari total guru 230.114 orang, terdapat 35.424 orang guru negeri dan 40.260 orang guru swasta dinyatakan tidak layak. Sedangkan di tingkat SMK sebanyak 20.678 orang guru SMK negeri dan 43.283 orang guru SMK swasta yang tidak layak dari total guru SMK 147.559 orang. Sedangkan menurut Fasli Jalil —Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPT)— data terakhir 2005 menunjukkan bahwa hanya ada 30 persen (di antara sekitar 2,7 juta) guru di Indonesia yang memenuhi kualifikasi minimum, atau setara S-1 atau D-4.

Kedua, Kurikulum terlalu mudah berubah. Ada rumor, “ganti menteri atau dirjen, maka ganti kurikulum”. Inilah yang terjadi di Indonesia. Satu konsep kurikulum belum tersosialisasikan ke seluruh Indonesia, sudah muncul kurikulum baru. Sebagai contoh, di daerah di luar pulau Jawa, belum sepenuhnya menerapkan konsep CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau kurikulum 1994, sudah diganti dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) atau kurikulum 2004. KBK belum merata di sekolah, sudah muncul konsep KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau kurikulum 2006. Maka tidak aneh, bila ada guru di daerah tetap menggunakan kurikulum 1974 meskipun di tingkat pusat telah bergonta-ganti kurikulum. Bahkan banyak guru yang merasa bingung untuk membuat kurikulum.

Ketiga, Administrasi yang sangat sentralistik dan birokratis. Ketika rezim Soeharto berkuasa, terbangun sistem sentralisasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan dan wewenang berada pada pemerintah —terutama pemerintah pusat, bukan pada sekolah. Tentu saja ini tidak menguntungkan pihak peserta didik. Misalnya, dalam penyelenggaraan ujian, yang paling memahami peserta didik adalah para pendidik (guru). Dan setiap daerah, kemampuan peserta didik berbeda-beda. Ketika yang membuat bahan ujian bukan guru di sekolah dan di samakan antar daerah, maka banyak yang gagal ujian. Oleh sebab itu, seiringan dengan diundangkan UU no. 22 tentang otonomi daerah, maka muncullah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (*School-based management*) untuk mengubah sistem sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi.

Keempat, Anggaran dana minim. Pada orde baru, anggaran pendidikan, kalau tidak salah, hanya 3 persen. Itu pun harus dibagi untuk dua departemen —depdiknas (dulu: depdikbud) dan depag— dan hilang di tangan para koruptor. Ketika reformasi bergulir menjadi 20 persen dari total APBN dan ini diatur UUD 1945 hasil amandemen. Namun dalam rancangan APBN 2006 yang disahkan menjadi UU APBN 2006 pada akhir Oktober 2005, hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10 persen atau Rp 40,1 triliun dimana Rp34,5 triliun untuk Depdiknas dan sisanya Rp5,6 triliun untuk pendidikan di Departemen Agama.

Kelima, Prasarana dan Sarana yang terbatas. Tidak dapat kita pungkiri, keterbatasan prasarana dan sarana cukup mempengaruhi mutu bahkan menghambat proses pendidikan. Dalam beberapa media massa, sering melaporkan bahwa di berbagai pelosok daerah, terutama di luar pulau Jawa, prasarana dan sarana sangat terbatas. Jangankan memiliki laboratorium, ruangan (kelas) untuk belajar saja mereka tidak memiliki.

Jadi, suatu hal yang wajar, manakala mutu pendidikan Indonesia bermasalah, sebab instrumental inputnya —lima hal di atas: tenaga pendidik, kurikulum, administrasi,

anggaran, serta prasana dan sarana— (masalah sistematika dan ekonomi politik pendidikan).

Adapun yang termasuk faktor eksternal atau *environmental input*, adalah: pertama, arus Modernisasi dan Globalisasi. Kata modernitas lebih ditujukan kepada 'keniscayaan' dan 'proses' perubahan. Sedangkan globalisasi bermakna akibat yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Dengan kata lain, akibat modernisasi maka dunia tak ubahnya desa buana (*global village*). Sehingga sekat, jarak, batas negara, ideologi, ekonomi, dan sosial-budaya, hilang. Menghadapi perubahan ini kita harus mampu berdialog dengan perubahan tersebut sekaligus mendefinisikan diri; apakah sebagai lawan, kawan, atau penonton perubahan? Betapa tidak, perubahan itu ibarat dua mata pisau, bisa konstruktif, juga bisa destruktif. Sebab perubahan itu tidak hanya pada tataran iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) *an sich*, melainkan mendobrak seluruh sistem nilai, baik itu sistem ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan.

Diantara ciri arus modernisasi dan globalisasi itu adalah industrialisasi dan urbanisme. Industrialisasi —menurut Kuntowijoyo— adalah diterapkannya organisasi, manajemen, dan teknologi dalam produksi barang dan jasa. Urbanisme adalah pertumbuhan menuju bentuk kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan dipakainya gaya hidup kota oleh desa.

Bukan industrialisasi dan urbanisme itu sendiri yang menarik perhatian kita, tapi pergeseran paradigma di masyarakat tentang urgensi pendidikan; ada ungkapan: "*Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, kalau bisa langsung kerja?*" Berbekal ijazah SD, mereka meninggalkan desa dan mengadu nasib di kota. Ternyata di kota, jangankan tamat SD, para alumni Perguruan Tinggi (PT) saja, ternyata tidak mendapatkan lapangan kerja. Akhirnya mereka dengan terpaksa bekerja 'apa saja' dengan upah yang tidak layak, asal mereka bisa hidup di kota. Seleksi alam tetap berlaku, siapa yang memiliki *skill* untuk *survive*, sedangkan yang serba 'pas-pasan', akan kembali ke kampung.

Kedua, Hegemoni dan Dominasi Rezim. Konstelasi politik, sangat mempengaruhi kondisi pendidikan. Ini terbukti pada orde baru. Pendidikan bukan lagi sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, melainkan jadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Apalagi yang terjadi bukan hanya kepentingan pribadi dan kelompok, melainkan terjadi "pembodohan" terhadap masyarakat.

Ketiga, Konglomeratisasi dan Elitisasi. Bidang ekonomi, juga sangat mempengaruhi pendidikan. Salah satu buah dari rezim Soeharto dalam bidang ekonomi adalah konglomeratisasi dan elitisasi. Dan itu berimbas dalam dunia pendidikan. Anggaran dari APBN rendah, sedangkan biaya pendidikan tinggi, maka yang terjadi adalah biaya yang dipungut dari peserta didik harus besar. Justru besarnya biaya SPP ini, membuat masyarakat kecil tidak mampu menyekolahkan para putra-putrinya. Yang bisa sekolah hanyalah anak para konglomerat dan kelompok elit. Kalau pun ada yang berusaha menyekolahkan anaknya, maka itu hanya sebatas tingkat dasar dan menengah, tidak sampai ke perguruan tinggi.

Keempat, Partisipasi masyarakat sangat kurang. Peran serta masyarakat dalam pendidikan juga sangat menentukan kualitas pendidikan. Namun yang terjadi

adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sangat kurang. Walaupun di setiap sekolah terbentuk wadah para wali murid atau wali mahasiswa di perguruan tinggi.

Kelima, Calo Karya Ilmiah dan Sertifikasi. Akhir-akhir ini, semakin marak para calo yang membuat karya ilmiah —baik itu paper, skripsi, disertasi, tesis, maupun hasil penelitian. Selain itu, juga bermunculan lembaga pendidikan, baik yang langsung maupun jarak jauh, yang membuka program tertentu dan memberikan sertifikat (ijazah), dengan hanya membayar sejumlah uang, tanpa harus mengikuti proses kegiatan belajar-mengajar.

Wacana Tekstual IV: Optimisme Kritis pada Pendidikan di Indonesia

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(mari kita isi bersama wacana tekstual ini dalam diskusi)